

SEJARAH AKUNTANSI DI NEGARA ASIA, BARAT DAN ISLAM DAN AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Mursalmina^{1*)} dan Murniati Mukhlisin^{2*)}

¹⁾Dosen Institut Agama Islam Tazkia, Bogor

²⁾Dosen Program Pascasarjana Institut Agama Islam Tazkia, Bogor

ABSTRACT

This research has objectives to investigate political, social, economic and cultural factors in accounting development in Western, Asian and Islamic countries as well as to study the impact to Islamic financial institutions. Using Interactive Analysis as the research method, this paper focuses on Indonesia, Britain and Saudi Arabia, as the countries of analysis due to their significant growth in Islamic finance. The analysis shows that accounting development in all countries under study is influenced by several factors such as history, politics and culture. These factors also lead the countries' policies how to develop shariah based accounting

Keywords: *History of Accounting, Islamic Accounting, Islamic Financial Institutions*

1. Perkembangan sistem akuntansi

Sistem akuntansi merupakan sebuah sistem pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu sang manajer untuk meningkatkan kualitas manajemennya, dan akan membantu sang investor untuk berinvestasi dengan tepat, serta otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah.

Perkembangan sistem akuntansi saat ini sangat menggiurkan, berawal dari sebuah pencatatan sederhana kemudian meningkat menjadi sistem pembukuan berpasangan selanjutnya berkembang dengan sistem yang menyebut asal negaranya, misalnya sistem Belanda, sistem Inggris, dan sistem Amerika Serikat. Sistem Belanda atau tata buku disebut juga sistem kontinental. Sistem Inggris dan Amerika Serikat disebut sistem *Anglo-Saxon*, dan kini telah meningkat, melesat cepat dengan sebuah standar berkelas seperti IFRS dan didukung dengan teknologi canggih modern masa kini.

Pembahasan tentang sistem akuntansi semakin hangat setelah banyak negara merealisasikan IFRS sebagai standar akuntansi nasional setelah meninggalkan sistem akuntansi

yang diadopsi berdasarkan tradisi, sosial, dan politik di masing-masing negara tersebut.

Krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada tahun 1997 bagaikan bencana Tsunami yang meluluh-lantakkan sebagian sendi-sendi perekonomian di Indonesia dengan riak riaknya yang masih terasa hingga sekarang. Krisis ekonomi tersebut seakan membangunkan bangsa Indonesia yang selama tiga puluh tahun telah dihipnotis dengan kestabilan yang semu serta pertumbuhan ekonomi yang ternyata sangat rapuh menghadapi terjangan fluktuasi perubahan mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

Pasca krisis tersebut, beberapa negara mulai kembali kepada sebuah sistem yang nyata, dan berwibawa, yaitu sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian lahirlah lembaga keuangan syariah di berbagai belahan negara yang berefek kepada perombakan sistem akuntansi menuju akuntansi syariah.

Berimplikasi dari hal tersebut, kami menyusun sebuah kajian tentang perkembangan sistem akuntansi dalam konteks sejarah, dengan riset ini kami berusaha menjawab dilema tentang pengaruh politik, sosial, ekonomi, serta budaya dalam perkembangan akuntansi di negara Barat, Asia dan Islam, dan seberapa besar dampak

Islam terhadap negara-negara tersebut seiring dengan tumbuhnya lembaga keuangan syariah akhir-akhir ini. Adapun kontribusi yang diharapkan adalah menambahkan literatur tentang sejarah akuntansi di berbagai negara dan arah kebijakan bagi pembuat keputusan untuk akselerasi pertumbuhan keuangan syariah.

Tulisan ini terdiri dari beberapa bagian, bagian kedua akan menjabarkan sejarah akuntansi di tiga negara yaitu Indonesia, Inggris dan Arab Saudi. Bagian ketiga akan membahas tentang *Interactive Analysis* sebagai metode penelitian sedangkan bagian keempat akan mengupas hasil riset dan bagian kelima adalah simpulan dan usulan riset ke depan.

2. Sejarah akuntansi di tiga negara (Indonesia, Inggris, Arab Saudi)

Akuntansi adalah sebuah sistem yang dibangun, dimodifikasi, serta dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang melekat pada suatu komunitas masyarakat dimana sistem akuntansi tersebut berada. Akuntansi termasuk salah satu profesi tertua. Karena, jika kembali kepada perputaran roda sejarah, bahwa dari sejak zaman prasejarah, setiap keluarga melakukan pencatatan makanan dan pakaian sendiri yang harus dipersiapkan dan kemudian mereka gunakan ketika musim dingin. Dan selain dari itu, bahwa ketika masyarakat mulai melakukan perdagangan, maka disaat itu juga mereka telah melakukan konsep nilai (*value*) dan juga sistem moneter (Nurhayati dan Wasilah, 2011).

Rizal Yaya dkk (2009) mengungkapkan bahwa sebelum berdirinya pemerintahan Islam, peradaban dunia berada dibawah kekuasaan dua negara besar yang memiliki wilayah yang luas, yaitu Bangsa Romawi di Barat dan Bangsa Persia di Timur. Sedangkan Sebagian besar daerah di Timur Tengah (Semenanjung Arab) berada dibawah jajahan kedua bangsa tersebut. Namun sistem siklus perdagangan Bangsa Arab hanya terbatas ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam atau Suriah (*Syria*) pada musim panas.

Putri (2010) mengutarakan bahwa para pakar menyetujui akan adanya sistem pencatatan pada peradaban kurang dari 3000 M. Pernyataan ini seolah-olah membantah akan asumsi sebagian kalangan yang mengatakan bahwa sistem pencatatan bermula dari penemuan Luca Pacioli pada tahun 1494 di Italia. Putri (2010) menambahkan bahwa sistem pembukuan di kala itu bisa dikenali dengan sistem penulisan, pengenalan angka Arab dan desimal, aljabar, bahan-bahan penulisan yang murah, meningkatnya literasi, dan adanya medium pertukaran yang baku. Namun Luca

Pacioli adalah aktor pertama pengkodifikasian akuntansi dengan mengulas tata buku berpasangan yang terkenal dengan *Particularis de Computis et Scripturis*. Dikarenakan tata buku tersebut adalah tulisan pertama kali dalam sejarah akuntansi yang diterbitkan dan dipublikasikan dan masih eksis hingga sekarang, dan ketika itulah awal mula pengembangan sistem akuntansi. Dan kemudian buku tersebut tersebar ke wilayah Eropa barat dan selanjutnya dikembangkan oleh para pengarang berikutnya. Namun hal tersebut tidak mengingkari akan adanya praktik sistem buku berpasangan yang dilakukan oleh para pedagang khususnya bangsa Arabia dan Mesir di era pemerintahan Islam pada abad ke 10. Namun pencatatannya tidak lengkap, sehingga kelengkapan sistem pencatatan akuntansi dimodernisasikan di Italia. Awal mula pengembangan sistem pembukuan berpasangan ini, dilakukan dengan cara sederhana, seperti dicatat pada batu, kulit, kayu dan alat lain yang bisa di maksimalkan dalam aktifitas akuntansi ini, dan catatan tua yang berhasil di temukan oleh para pakar sejarah dari berbagai tempat, seperti Mesir dan Yunani kuno bahkan sebagian masih tersimpan yang di klaim berasal dari Babilonia pada tahun 3600 SM (Putri, 2010). Nurhayati dan Wasilah (2011) menambahkan bahwa Bukti tentang pencatatan (*bookkeeping*) tersebut dapat ditemukan dari mulai kerajaan Babylonia (4500 SM), Firaun Mesir dan kode-kode Hammurabi (2250 SM), sama halnya dengan ditemukan kepingan pencatatan akuntansi di Ebla, Suriah Utara.

2.1 Sejarah Perkembangan Akuntansi Di Indonesia

Antonio dan Mukhlisin (2013) membagi sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia kedalam 4 Fase, yaitu: fase awal mula kerajaan Islam pada tahun 1292 sebagaimana yang diungkapkan oleh Marco Polo; Fase Penjajahan Belanda tahun 1609-1942; Fase masa penjajahan Jepang; kemudian ditutupi dengan fase Indonesia pasca kemerdekaan yaitu 1945.

a. Masa kerajaan Islam

Jejak munculnya Islam di Indonesia telah direkam jelas oleh Marco Polo dalam perjalanan balik dari China pada tahun 1292 (Sukarsono, 1998). Menurut Dalton (1995) bahwa Indonesia telah melakukan aktifitas perdagangan pada abad 14 dengan datangnya para Gujarat, India.

b. Penjajahan Belanda (1609-1942)

Beberapa referensi mengatakan bahwa dalam waktu 350 tahun Belanda menjajah Indonesia telah banyak aktifitas perdagangan yang dilakukan, seperti: peredaran uang logam(1820-1890); pengembangan harga

padi(1829-1890); kerja paksa (1835-1880); impor kapas (1830-1890); ekspor hasil panen (1840-1890) (Rustiana, 2016).

Praktik akuntansi di Indonesia telah ada pada masa penjajahan pada tahun 1642, dan kemudian fakta tersebut benar-benar nyata dengan adanya praktik pembukuan yang dilakukan oleh *Amphiooen Sociteyt* di Jakarta (Soemarsono 1995).

Pada masa penjajahan, mengadopsi sistem akuntansi yang diperkenalkan oleh Belanda, sistem akuntansi ini lebih dikenal dengan sistem kontinental atau juga disebut dengan sistem tata buku, dan sistem ini berbeda dengan sistem akuntansi yang kita kenal (Putri, 2010).

Adanya sistem akuntansi di Indonesia pada masa penjajahan diperkuat dengan pernyataan Soemarsono (1995) tentang adanya auditor pertama berkebangsaan Belanda J.W Labrijin yang sudah berada di Indonesia pada tahun 1896. Namun ketika Belanda bertolak balik meninggalkan Indonesia hanya menyisakan satu-satunya akuntan yang berkebangsaan Indonesia yaitu Prof. Dr. Abutari hingga memasuki tahun 1947, dan kelangkaan akan ahli akuntansi ini menjadi salah satu faktor berpalingnya Indonesia dari akuntansi gaya Eropa mengikuti model akuntansi gaya Amerika.

Perkembangan akuntansi di Indonesia juga sarat akan nuansa politik, seperti yang terjadi pada era penjajahan dimana seorang akuntan dapat memperoleh gelar melalui pendidikan formal maupun non formal. Dan kemudian pada era 1955-1979 gelar akuntan mulai diatur dalam UU No.34 Tahun 1954 dan juga dengan pembukaan jurusan akuntansi di UI tahun 1955. Pada era ini, hanya universitas negeri lah yang berhak mengeluarkan output profesional akuntan. Namun pada era 1980-2000, Perguruan tinggi swasta sudah mulai diizinkan mencetak akuntan profesional. Kemudian muncul UU No. 21 Tahun 1989 dimana gelar akuntan diperoleh dengan syarat harus bergelar sarjana ekonomi. Dan memasuki fase 1997, izin praktek akuntan hanya diperoleh jika telah menempuh USAP. Dan sejak tahun 2001 terbitlah SK Mendikbud No. 056/U/1999 mulai September 2002 mahasiswa jurusan akuntansi harus menempuh pendidikan di PPA paling lama 2 tahun untuk mendapat gelar akuntan. Dan PPA diselenggarakan oleh seluruh perguruan tinggi yang memenuhi syarat (Putri, 2010).

c. Masa penjajahan Jepang (1942-1945)

Menurut Suardikha (2012) bahwa Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia pada bulan Maret tahun 1942.

Melalui pemerintah baru ini sistem perdagangan mengacu kepada book-keeping yang tercantum dalam sistem Belanda dan Jepang. Namun sistem pencatatan akuntansi Jepang hanya pihak akuntan resmi Jepang yang mengetahuinya.

d. Setelah kemerdekaan (1945)

Setelah kemerdekaan, praktisi akuntan yang tersisa hanya dua, yaitu: Abutari dan Soemardjo, yang mana keduanya menyelesaikan sarjananya di Netherland pada tahun 1956. Mereka bersama 5 mitranya berusaha keras membentuk asosiasi akuntan untuk Indonesia dan menolak keras untuk menjadi anggota NIVA (*Nederlands Institute Van Accountants*) atau VAGA (*Vereniging Academisch Gevormde Accountants*) yang dibentuk oleh Belanda (IAI, 2011). Berimplikasi dari fenomena tersebut, terbentuklah Komite untuk mendirikan asosiasi akuntan Indonesia pada 17 Oktober 1957, dan ikatan tersebut diakui secara resmi pada tanggal 23 Desember 1957 yang kemudian dikenal dengan nama IAI (IAI, 2017).

Pada tahun 1973, IAI membentuk sebuah komite untuk mengumpulkan materi dan struktur yang digunakan oleh GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) dan GAAS (*Generally Accepted Auditing Standards*) dan komite tersebut mulai dikukuhkan pada tahun 1974 yang dikenal dengan komite PAI (Prinsip Akuntansi Indonesia). Namun pada akhir tahun 1984, standar akuntansi di Indonesia mengikuti standar yang bersumber dari IASC (*International Accounting Standard Committee*) dan sejak itulah IAI berkomitmen mengikuti IAS (*International Accounting Standards*) atau sekarang sudah disebut IFRS (*International Financial Reporting Standards*).

Putri (2010) berkomentar bahwa perputaran globalisasi yang semakin tidak pasti hingga menyatukan hampir seluruh negara di dunia dalam satu komunitas yang di mediumkan oleh teknologi dan informasi yang semakin murah, menuntut adanya transparansi di segala bidang. Sehingga SAK yang berkualitas menjadi salah satu prasarana penting untuk terwujudnya transparansi tersebut. Oleh karena itu, pengembangan SAK yang baik, sangat relevan dan mutlak sangat dibutuhkan di era ini. Namun berimplikasi dari hal tersebut IAI sebagai wadah profesional di Indonesia sangat tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam ranah dunia usaha dan profesi akuntan. Itu dapat dilihat

dari fakta kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga sekarang. Setidaknya ada tiga terobosan dalam pengembangan SAK di Indonesia :

1. Terobosan pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu pada pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku "Prinsip Akuntansi Indonesia" (PAI).
2. Terobosan kedua terjadi pada tahun 1984. Ketika itu komite PAI melakukan kegiatan revisi secara mendasar yang dilakukan pada tahun 1973 dan kemudian mengkondisifikasinya dalam buku "Prinsip Akuntansi Indonesia 1984" dalam rangka mengintegrasikan sistem akuntansi dalam dunia usaha.
3. Terobosan ke tiga terjadi pada tahun 1994, dimana IAI melakukan revisi total PAI 1984 serta melakukan kodifikasi dalam buku "Standar Akuntansi Keuangan 1994" per 1 Oktober 1994. dan sejak itu juga IAI memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Di era berikutnya terjadi perubahan dalam harmonisasi ke adaptasi, dan pada akhirnya menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan IFRS.

Gamayuni (2009) menambahkan bahwa di era globalisasi ini menuntut akan terwujudnya suatu sistem akuntansi internasional, atau diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi internasional, dengan tujuan supaya dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan pelanggan, pemasok, penanam modal, dan kreditor. Itu disebabkan karena teknologi informasi yang berkembang akhir-akhir ini membuat informasi menjadi eksis di seluruh dunia. Sehingga perkembangan ini memiliki akses bagi banyak investor untuk memasuki pasar modal lintas negara di seluruh dunia, misalnya: Investor dari Belanda bisa berinvestasi di Jepang, Amerika, Singapore, atau bahkan Indonesia. Dan fenomena ini tidak bisa terpenuhi apabila perusahaan-perusahaan masih memakai prinsip pelaporan keuangan yang berbeda-beda. Amerika memakai US GAAP yang dikeluarkan oleh Financial Accounting Standards Board (FASB), Indonesia memakai PSAK-nya IAI, Uni Eropa serentak memakai

IFRS yang dibuat oleh Indonesian Accounting Standards Board (IASB). Hal tersebut melatarbelakangi perlunya adopsi IFRS saat ini (Gamayuni, 2009).

Walaupun demikian, Gamayuni (2009) tidak menyangkal bahwa proses harmonisasi memiliki hambatan antara lain nasionalisme dan budaya tiap-tiap negara, perbedaan sistem pemerintahan pada tiap tiap negara, perbedaan kepentingan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar negara, dan juga tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi.

2.2. Sejarah perkembangan akuntansi di Negara Barat

Awal mula proses akuntansi di Inggris digunakan untuk mengontrol hutang dan mengukur kejujuran karyawan (Day, 2000). Namun fungsi Akuntansi diperluas seiring dengan kebutuhan para manager terhadap pencatatan akuntansi yang modern. Sehingga pada tahun 1844 terbitlah undang-undang perusahaan saham gabungan bahwa bahwa buku rekening harus menunjukkan buku rekening secara penuh dan adil (Day, 2000).

Pembentukan Royal Charter to the Society di Edinburgh dan Institute of Accountant and Actuaries di Glasgow pada tahun 1853-1855 merupakan cikal bakal terbentuknya profesi akuntansi di Inggris. Cooke dan Wallace (1990) mengatakan bahwa faktor lingkungan internal dan eksternal mempengaruhi terhadap perkembangan akuntansi di negara tersebut. Penelitian dilakukan pada tahun 1990 dan mengacu pada upaya menuju harmonisasi internasional atas prinsip dan praktik akuntansi yang pada saat Inggris menerapkan Standar Akuntansi Internasional (*International Accounting Standards/IAS*). Studi tersebut menunjukkan hasil bahwa Inggris (yang serupa dengan negara maju lainnya) lebih mungkin dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu tahap perkembangan ekonomi, tujuan masyarakat, peraturan hukum, sistem politik, sistem ekonomi, tingkat pendidikan, tekanan keuangan, dan variabel budaya. Sementara Cooke dan Wallace (1990) menyajikan faktor yang sangat umum.

Tarca (2004) mengemukakan bahwa Inggris termasuk di antara lima negara maju yang dapat dipastikan bahwa perusahaan di negara tersebut melakukan penerapan standar akuntansi internasional secara sukarela. Sehingga ini berefek kepada munculnya peraturan pemerintah terhadap pengadopsian standar akuntansi internasional di negara tersebut.

2.3. Sejarah perkembangan akuntansi di negara Islam

a. Melalui perdagangan

Salah satu surah dalam Al-Quran telah menceritakan tentang kebiasaan perjalanan dagang yang dilakukan oleh bangsa Arab (Quraisy) ke negeri Syam pada musim panas dan menuju ke negeri Yaman pada musim dingin (QS Al-Quraisy (106): 2). Ini suatu pertanda bahwa bangsa Arab telah melakukan proses pencatatan transaksi. Syakir (2010) dalam *tarikhul-Islami* menjelaskan bahwa orang-orang Arablah yang menemukan tulisan pada tahun 3200 SM. Dan ini merupakan awal mulanya kemajuan besar dalam pencatatan dan penulisan pengetahuan serta pemikiran. Bahkan Chatfield (1953) menambahkan dalam bukunya *Contemporary Studies in the Evaluation of Accounting Thought* bahwa manusia berhutang budi kepada penduduk antara dua sungai di Mesir (Negeri Rafidin), karena mereka telah menemukan tulisan.

Rasul adalah tokoh pertama yang membangun sistem pemerintahan di Arab dan juga sosok pertama yang mendirikan institusi keuangan publik (*public treasury*) dan kemudian dikenal dengan nama Baitul mal. Dan ketika itu sumber pendapatan negara adalah Zakat, *Ushr*, *Jizya*, *Ghanimah*, *Fay'i*, sedangkan petugas Zakat yang ditunjuk oleh rasul dinamakan *Musaddiq* atau *Sa'i* yang bertugas menagih Zakat dan melakukan proses perhitungan dengan teliti. Dalam perhitungan Zakat, seorang *musaddiq* harus memiliki pengetahuan tentang jenis, haul (tahun buku) dan jumlah harta kena Zakat, dan itu semua merupakan aktivitas yang dilakukan dalam dunia akuntansi (Al-Qardhawi, 1998).

Rasul mendirikan Baitul mal pada abad ke-7, yang berfungsi sebagai penerimaan, pengumpulan, serta penyaluran Zakat, *Ushr*, *Jizyah*, dan *Kharaj* untuk kepentingan negara. Meskipun pengelolaan baitul mal masih sederhana akan tetapi telah terdapat empat jabatan dalam Baitul mal tersebut seperti Qadhi, Sekretaris, dan pencatat administrasi pemerintahan (Nurhayati dan Wasilah, 2009).

Al-Qardhawi (1998) menceritakan bahwa Akuntansi Zakat yang dipraktekkan pada masa Rasul meliputi: tugas Pengumpul (*Jabin*), Penyimpan (*Khazin*), Penulis (*Kataib*), Penghitung (Hasib) dan sebagainya.

Setelah Rasulullah wafat, maka amanah kepemimpinan berada dalam genggamannya Abu Bakar, yang secara resmi terpilih sebagai khalifah, dan ia memimpin selama 2 tahun (11-13 H/ 632-634M), di samping kesibukannya memerangi kaum murtaddin yang mengingkari

akan kewajiban Zakat, ia tetap memperhatikan administrasi pemerintahan negara (Ali, 2007).

Setelah pemerintahan Abu Bakar, Amanah kepemimpinan di pegang oleh Umar Bin Khatab (13-24 H/634-644H), pada masa ini wilayah pemerintahan Islam meluas hingga sampai ke Irak, Syiria dan Mesir. Berimplikasi dari itu, pendapatan pemerintahan meningkat dengan sangat signifikan, sehingga pemerintahan mengharuskan pengelolaan keuangan negara secara sistematis, dimasa pemerintahan inilah pendapatan negara tidak dapat dibagikan habis seperti pada masa masa rasulullah S.A.W, karena mereka mulai membuat perencanaan keuangan dalam baitul mal (Nurhayati dan Wasilah, 2011) dan pada masa ini terbentuklah lembaga perbendaharaan umat yang dikenal dengan *Diwan* yang artinya (pencatatan dalam bentuk daftar), namun (Ali, 2007) menyebutnya sebagai *Department of Finance* dan *Diwan* ini berfungsi mengatur penerimaan dan pengeluaran negara.

Setelah berakhirnya kekhalifahan Umar bin Khatab, maka Ustman bin Affan pemegang kepemimpinan selanjutnya (24-36 H/644-656 M). Pada masa Khalifah Ustman bin Affan, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap sistem yang ditinggalkan Khalifah sebelumnya. Santunan yang bertambah ketika masa Usman adalah setiap bayi yang lahir mendapatkan 50 Dirham, dan jika sudah berusia satu tahun dinaikkan menjadi 100 dirham setahun (Ali, 2007).

Ketika kepemimpinan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, (36 -41 H/ 656-661 M) juga tidak ada perubahan terhadap sistem administrasi dikarenakan kesibukan menghadapi perpecahan internal. Nurhayati dan Wasilah (2011) menulis bahwa pada diwan yang dibentuk Khalifah Umar terdapat 14 departemen dan 17 kelompok. Baitul mal tidak lagi hanya berpusat di Madinah saja, namun tersebar keseluruh wilayah taklukan pada era Khalifah Umar istilah pembukuan dikenal dengan nama "Jaridah", dan dalam bahasa Inggris di sebut dengan "Journal" sedangkan di Venice dikenal dengan nama "Zournal". Sedangkan fungsi akuntan dikenal dengan sebutan Al-Amil, Mubashar, Al- Kateb, dimana mereka itu bertanggung jawab mencatat dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan. Sedangkan akuntan disebut dengan Muhasabah atau al-Muhtasib.

Zaid (2001) menyatakan bahwa setelah penaklukan Makkah 8 H (630 M), Bangsa Arab memperluas perdagangan hingga ke arah timur dan India serta ke arah barat hingga Italia. Para pedagang dari Arab mengeksport barang-barang mewah yang belum ada di Eropa. Sehingga melalui siklus inilah pemindahan sistem pencatatan akuntansi dan laporan keuangan,

secara implisit Zaid (2001) memberikan sebuah pemikiran bahwa hubungan dagang antara pedagang Muslim dengan pedagang di Italia memberikan dampak terhadap perkembangan akuntansi di Republik Italia.

Pada masa Daulah Umayyah, Khalifah Walid bin Abdul Malik (86 H/706-715 H) adalah orang yang pertama mengumpulkan buku-buku akuntansi yang berserakan, Namun pada era daulah bani Abbasiyah tercatat bahwa M.Khalid Bin Burmuk pada tahun 132 H/750 M diangkat sebagai kepala Diwan Kharaj (Diwan yang mengurus tentang pemasukan pertanian) dan ia mereformasi sistem kedua diwan dan mengembangkan buku-buku akuntansi (Antonio, 2013).

Pada masa Dinasti Abbasiyah yang kedua, Abu Ja'far al-Mansur yang memegang pemerintahan (754-775 H), ia meletakkan dasar-dasar ekonomi dan keuangan negara dengan sangat baik. Sehingga kas negara selalu penuh, kemudian memasukan lebih banyak dari pengeluaran, dan tidak pernah terjadinya defisit anggaran.

Upaya pengembangan akuntansi Islam kemudian bertahap sehingga sampai kepada skala internasional ditandai dengan adanya badan yang bernama AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), yang didirikan pada tanggal 27 Maret 1991 di Bahrain (AAOIFI, 2010).

Pada tahun 2012, sistem akuntansi di Saudi beralih ke IFRS (SOCPA, 2017). Sejak awal, profesi akuntansi dan audit di Arab Saudi telah mengalami kemajuan besar dalam waktu singkat. Sejak awal 1930an, pemerintah Saudi telah memberikan perhatian terhadap pentingnya pengembangan dan pengorganisasian profesi akuntansi sebagai cerminan dalam bekerja secara positif dengan stabilitas dan perbaikan lingkungan ekonomi. Dampaknya, pemerintah Saudi mengarahkan perhatiannya pada langkah pertama dalam pengembangan profesi akuntansi yaitu mengeluarkan peraturan bisnis komersial untuk memastikan terorganisirnya peraturan dalam proses pembukuan, dan pemerintah mewajibkan setiap entitas yang terlibat dalam kegiatan bisnis untuk menerapkan catatan akuntansi (SOCPA, 2017). Langkah fenomenal berikutnya yang diambil oleh pemerintah Saudi, tentang Peraturan Perusahaan terjadi pada tahun 1965, Undang-undang ini mewajibkan perusahaan untuk membuat laporan keuangan, dan mengizinkan Akuntan Publik Bersertifikat (CPA) untuk mengaudit laporan keuangan tersebut. Undang-undang tersebut menjelaskan persyaratan mengenai pengangkatan CPA dan menjelaskan tanggung jawab mereka serta ruang lingkup pekerjaannya (SOCPA, 2017).

Pada tahun 1968, sebuah terobosan baru di keluarkan oleh Menteri Perdagangan dalam mengorganisir profesi auditing di Arab Saudi. Peraturan ini diikuti pada tahun 1974 dengan Undang-undang Peraturan CPA, yang berimplikasi terhadap pembentukan komite audit bersertifikasi yang lebih tinggi, yang bertanggung jawab dalam pengawasan serta pemantauan terhadap profesi akuntansi dan audit di Arab Saudi (SOCPA, 2017). Pengembangan komite ini telah mendorong institusi lain seperti universitas dan firma akuntan publik besar untuk berpartisipasi dalam pengembangan profesi akuntansi.

Kemudian Pada awal tahun 1980an, King Saud University berdiri, dan merupakan universitas pertama yang didirikan di Saudi Arabia, kampus tersebut berpartisipasi terhadap kemajuan sistem akuntansi dengan menyelenggarakan seminar, lokakarya dan simposium untuk meningkatkan status profesi akuntansi. Upaya ini mengarah pada pembentukan SAA (Saudi Arabia Academy), yang merupakan asosiasi akademis yang bertanggung jawab atas kemajuan penelitian akuntansi dan audit, serta pertukaran gagasan antara akademisi akuntansi di seluruh Arab Saudi (SOCPA, 2017). Pada tahun 1980-1981 sebagai bagian dari upaya pengembangan profesi akuntansi di Arab Saudi, sebuah studi perbandingan profesi akuntansi dan audit di negara lain diusulkan dan dilakukan. Tujuannya adalah untuk membuat rekomendasi mengenai hal berikut (SOCPA, 2017): persyaratan standar akuntansi dan auditing yang memadai; kerangka kerja yang mengatur dan mengatur persyaratan pelaporan keuangan; audit dan etika; dan organisasi internal profesi akuntansi.

Rekomendasi tersebut dibentuk melalui tinjauan dan pemeriksaan hukum serta peraturan yang cermat dan terperinci mengenai peraturan perundang-undangan negara-negara terpilih. Sebagai hasil studi banding, pada tahun 1982, penyusunan kerangka konseptual yang mengidentifikasi tujuan dan konsep akuntansi keuangan dan draf standar yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan umum telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan (SOCPA, 2017). Hal ini menyebabkan terbentuknya SOCPA pada tahun 1992, sebuah badan yang mewakili puncak dari semua upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti Menteri Perdagangan dan akademisi akuntansi profesional di Arab Saudi (SOCPA, 2017).

SOCPA adalah badan yang bertanggung jawab atas administrasi dan pengawasan proyek transisi yang diumumkan pada tahun 2012. Karena SOCPA adalah anggota IFAC, ia memiliki akses ke berbagai pengalaman anggota

badan negara lain yang telah beralih ke IFRS (SOCPA, 2017). Hal ini diharapkan akan berdampak positif bagi transisi menuju IFRS. Prosedur untuk standar Akuntansi yang diadopsi oleh SOCPA dipengaruhi oleh Barat khususnya Amerika Serikat (SOCPA, 2017).

Salah satu faktor terintegrasinya IFRS di Arab Saudi adalah karena adanya seruan secara terus menerus dari Kelompok Dua Puluh (G-20) dalam rangka penyatuan Standar akuntansi yang digunakan untuk melaporkan transaksi bisnis melalui penggunaan satu set IFRS dalam membantu terhadap penilaian kemajuan serta perbaikan sektor keuangan (IFRS Foundation 2014). Selain itu, ada seruan terus menerus dari G-20 ke standar standar dan Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk mencapai satu rangkaian IAS berkualitas tinggi (IFRS Foundation, 2016).

Sebagai tanggapan atas seruan internasional untuk IAS ini, SOCPA mengatur sebuah rencana untuk mempelajari kemungkinan transisi ke IFRS yang dikeluarkan oleh IASB. Setelah mempertimbangkan studi lingkungan Saudi, pengaruh hukum Syariah, dominan Peraturan dan tingkat kesiapan baik yang berkaitan dengan teknis, manusia atau pendidikan (SOCPA 2017), komite SOCPA mencapai kesimpulan bahwa transisi bertahap ke IFRS akan berlangsung selama lima tahun. Jangka waktu ini diberikan untuk mempertimbangkan faktor ekonomi dan lingkungan dan memungkinkan para pemangku kepentingan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan perubahan baik pada tingkat profesional maupun teknis.

Proses perealisasi terhadap IFRS berjalan melalui serangkaian tahapan dan melibatkan sejumlah peserta. Prosesnya dimulai dengan dua komite teknis: komite standar akuntansi dan komite standar audit. Kedua Komite teknis tersebut memulai dengan mempelajari standar internasional seperti akuntansi dan audit. Tugas mereka adalah memutuskan tindakan yang tepat dalam mengadopsi dan penerapan interpretasi IFRS. Misalnya apakah standar harus diterima tanpa amandemen atau diubah agar sesuai dengan lingkungan setempat (SOCPA, 2017).

Setelah tahap awal yang intens ini selesai, pertemuan terbuka dengan sejumlah pihak yang berkepentingan seperti akademisi akuntansi, pengguna laporan keuangan, profesional akuntansi dan perwakilan badan pengawas dan pengawas diatur oleh SOCPA. Setiap ide yang eksis selama pertemuan ini akan dibahas dan dipertimbangkan oleh komite teknis terkait. Dari sini, setiap perubahan awal atau

penambahan terhadap standar dilakukan. Rekomendasi komite teknis kemudian dilepaskan ke publik untuk mendapat komentar lebih lanjut serta amandemen yang diperlukan lebih lanjut dibuat sesuai dengan standar (SOCPA, 2017).

Proyek transisi menuju IFRS disetujui oleh SOCPA pada tanggal 18 Februari 2012. Adapun mengenai lingkungan, ekonomi, dapat dikatakan bahwa meskipun Arab Saudi didirikan sebagai Kerajaan pada tahun 1932, sebagian besar perkembangan ekonominya berlangsung relatif baru-baru ini. Baru sekitar tahun 1970an, Pemerintah Arab Saudi melakukan upaya pengembangan ekonomi, dan menciptakan infrastruktur nasional jalan raya modern, pelabuhan, bandara, sekolah, dan rumah sakit. Dengan kenaikan harga minyak pada tahun 1973-1984, sumber daya untuk membiayai pembangunan meningkat pesat, dan adanya kesibukan dalam menciptakan infrastruktur modern secepat mungkin. Kecepatan pelaksanaan menghasilkan beberapa limbah, namun keseluruhan rencana pembangunan pertama, kedua dan ketiga berhasil dilaksanakan, dan struktur ekonomi modern yang terpadu diciptakan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir laju pembangunan telah melambat. Pada saat yang sama, investasi kurang dibutuhkan, dengan selesainya proyek infrastruktur besar.

3. Metodologi riset; *Interactive Analysis*

Metode penelitian yang ingin penulis gunakan dalam menyusun paper ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dimana metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran secara universal dan pemahaman yang mendetil mengenai sebuah fenomena pustaka tentang sejarah akuntansi yang jarang ditemukan, seperti penyebab munculnya sistem akuntansi jika di analisa dari sisi kebudayaan, ekonomi, politik, dan sosial di suatu negara tersebut. Hasil penelitian ini merujuk kepada studi pustaka yang berkaitan dengan berputarnya roda sejarah akuntansi dari dulu hingga kini.

Adapun tehnik analisis data yang digunakan dalam analisa ini seperti model dari Miles dan Huberman (1994) yang menggunakan *Interactive Analysis* yang membagi *schedule analysis* menjadi koleksi data, reduksi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan. Singkatnya, kami mengoleksi data atau mencatat semua temuan yang kami dapatkan di lapangan melalui studi literatur dan penelitian terdahulu, kemudian kami menyajikan data tersebut dalam kerangka tujuan penelitian dan fokus terhadap objek yang ingin diteliti. Kemudian kami analisa data tersebut dengan pendekatan sebab akibat.

Sumber data yang menjadi rujukan kami adalah sumber data sekunder, yang merupakan penelitian atau buku-buku serta jurnal yang mendukung tema penelitian. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan akuntansi di negara Asia, Barat, dan juga di negara Islam?
2. Seberapa berpengaruh faktor ekonomi, sosial, budaya, serta politik terhadap perkembangan akuntansi di negara tersebut?
3. Sejauh manakah nilai – nilai Islam dapat mempengaruhi perkembangan akuntansi yang sudah ada di negara – negara tersebut seiring dengan perkembangan keuangan syariah saat ini?

4. Analisa Perkembangan Akuntansi di Tiga Negara

Bila dilihat dari sistem perkembangan akuntansi, maka sebagian besarnya sarat akan nilai politik, seperti perkataan (Diaconu, 2007) bahwa Amerika serikat terlibat dalam pengembangan standar akuntansi internasional lewat IASB, Secara *de facto*, negara-negara yang mengembangkan standar akuntansi Internasional sebenarnya memiliki ketergantungan perdagangan dengan amerika serikat. Konsekuensinya, negara -negara tersebut harus mempersiapkan sistem akuntansi mereka sesuai pedoman akuntansi umum yang digunakan di Amerika Serikat (US GAAP). Amerika serikat sebagai negara yang secara ekonomi memang kuat dan besar di dunia dan kemampuannya untuk mengendalikan sebagian besar *capital market* posisinya sangat kuat terhadap perubahan IASB. Dampaknya jelas, IAS tidak dapat diadopsi tanpa persetujuan dari FASB dari Amerika serikat.

Begitu juga yang terjadi di Indonesia, bahwa menurut Graham dan Neu (2003) sistem akuntansi di Indonesia itu merupakan fenomena intervensi akuntansi melalui harmonisasi yang dilakukan dengan menggunakan aliran kebijakan di Indonesia dan itu terjadi setelah mengalami krisis keuangan tahun 1997 dan IMF (International Monetary Fund) adalah aktor utamanya. IMF mengajukan beberapa syarat atas pinjaman yang diberikannya apabila menginginkan perubahan makro ekonomi di Indonesia. Salah satu syaratnya adalah praktik akuntansi di Indonesia harus sesuai dan mengadopsi kebijakan keuangan neoliberal yang dibuat oleh IASB. Tekanan ekonomi politik tersebut memperlihatkan bagaimana fungsi akuntansi sebagai teknologi dari kendali terikat. Bahkan kesimpulan penelusuran akuntansi dan globalisasi dari Graham dan Neu (2003) adalah bahwa organisasi dan teknologi akuntansi sebenarnya tidak hanya diarahkan untuk

menciptakan dan menstabilkan asimetri dan ketidak seimbangan lintas batas internasional, tetapi lebih jauh lagi sebenarnya akuntansi tidak netral untuk melayani *salirnt liberalization* terutama bagi MNC's lewat institusi -institusi internasionalnya (IMF, IASB, Worldbank, dan lain-lainya).

Secara politik IFRS telah diperkenalkan ke Indonesia melalui pantulan industri. Hal ini tak terelakkan karena sebagai negara berkembang yang membutuhkan pembangunan masif, Indonesia sangat bergantung pada donor seperti Bank Dunia dan IMF. Bank Dunia telah menyetujui pinjaman untuk Indonesia sejak tahun 1977, dan pengaruh pinjaman tersebut sangat berdampak terhadap standarisasi pelaporan keuangan pada tahun 1984.

Begitu besarnya pengaruh kebijakan serta politik dalam perkembangan akuntansi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemudian pada masa penjajahan, bahwa Belanda meninggalkan sistem akuntansi di Indonesia setelah mereka bertolak pergi ke negara asalnya, ini juga merupakan dari gaya politik Belanda yang memaksa wilayah jajahannya untuk memakai sistem akuntansi yang dianutnya.

Dan jika melihat sejarah akuntansi di Indonesia mulai zaman penjajahan, maka nuansa politik telah terjadi dari dulu (Putri, 2010). Dalam studi literatur disebutkan bahwa pada era penjajahan seorang akuntan dapat memperoleh gelar melalui pendidikan formal dan non-formal. Namun seiring dengan perputaran arus politik, dan juga bergantinya kepemimpinan yang berdampak terhadap bergantinya kebijakan, maka sekarang gelar akuntansi hanya dapat diperoleh melalui lembaga atau institusi tertentu. Namun Arab Saudi adalah negara yang tidak pernah dijajah oleh barat, namun penjajahan yang dilakukan oleh bangsa barat terhadap Arab adalah melalui sistem ekonomi. Dimana mereka harus memakai sistem ekonomi barat karena banyak investor asing.

Arab Saudi yang merupakan pecahan dari jazirah Arab juga tidak luput dari faktor politik terhadap sistem akuntansi di negara tersebut. Jika melihat dari sejarahnya ketika Arab Saudi masih menyatu dengan jazirah Arab, perkembangan sistem akuntansi pada masa khalifah Umar bin Khatab sangat meningkat karena perluasan wilayah Islam ketika itu, dan pada akhirnya Umar bin Khatab mengeluarkan kebijakan untuk pengembangan sistem pencatatan demi kemaslahatan umat. Dan ketika Arab Saudi telah berdiri sebagai sebuah negara maka pada tahun 1970-an, ketika negara tersebut baru mengembangkan sistem bisnisnya, barulah Arab Saudi berfikir untuk meleburkan

IFRS sebagai sebuah sistem di negaranya karena dorongan dari G-20, dan ditambah lagi harga minyak yang naik secara signifikan pada tahun 1973-1984.

Jika melihat lingkungan ataupun sosial sebagai faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan akuntansi maka Cooke dan Wallace (1990) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan standar akuntansi internasional di suatu negara disebabkan oleh faktor lingkungan internal dan eksternal. Mereka melakukan penelitian di negara Inggris, studi tersebut menemukan bahwa Inggris (yang serupa dengan negara maju lainnya) lebih mungkin dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu tahap perkembangan ekonomi, tujuan masyarakat, peraturan hukum, sistem politik, sistem ekonomi, tingkat pendidikan, tekanan keuangan, dan budaya. Namun menurut (Tarca, 2004) bahwa Inggris salah satu negara yang menerapkan sistem akuntansi secara sukarela. Setelah diteliti lebih jauh ternyata disebabkan oleh perusahaan yang berada di Inggris melakukan pengadopsian berkala terhadap standar akuntansi internasional, fenomena tersebut dikarenakan banyaknya pendapatan asing di bursa efek Inggris.

Dan ini bertolak belakang dengan negara Republik Indonesia, dimana faktor politik dan kebijakan lebih dominan dari pada faktor sosial atau lingkungan terhadap perkembangan akuntansi. Seperti fakta yang terjadi Di Indonesia, bahwa ketika Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1992, sebagai bank Islam pertama yang ada di Indonesia, namun jika kita menelisik terhadap peraturan maka tidak ada perubahan yang signifikan dari peraturan sistem akuntansinya, sehingga bank tersebut dilegalkan dan didirikan dengan menggunakan undang-undang yang ada. No. 7/1992 tentang perbankan. Dan standar akuntansi yang digunakan adalah standar akuntansi yang ada, yaitu PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 31 yang merupakan standar akuntansi untuk semua operasi perbankan komersial. Namun seiring dengan perkembangan pesat keuangan syariah di Indonesia, PSAK 31 dikembangkan menjadi PSAK 59 (untuk perbankan syariah), PSAK 101-107 (untuk entitas syariah) yang terpisah dari PSAK konvensional dan IFRS (Mukhlisin dkk, 2015).

Arab Saudi juga memiliki sejarah tersendiri tentang berkembangnya sistem akuntansi yang dipengaruhi oleh faktor budaya ataupun sosial, seperti munculnya pencatatan di tanah Arab dikarenakan adanya kebiasaan orang Arab yang melakukan perdagangan

hingga ke luar negeri seperti yang terjadi pada suku Quraisy yang diceritakan di dalam Alquran. Dan juga tidak lepas dari kebutuhan sosial, seperti berkembangnya pencatatan pada masa Rasulullah dan Khalifah karena adanya pemungutan Zakat.

Dengan perkembangan akuntansi hingga saat ini, dan munculnya lembaga keuangan syariah di berbagai belahan negara Muslim, maupun non-Muslim, apakah IFRS yang dipakai oleh berbagai belahan dunia pada umumnya sudah dileburkan dengan nilai – nilai Islam? Jika belum, apakah transparansi yang dipromosikan oleh IFRS yang berasal dari tradisi Anglo-Saxon harus diakui dan digunakan oleh Indonesia yang notabene mayoritas Muslim, jika melihat dari sisi yang berbeda bahwa Inggris adalah negara maju dengan penduduk muslim minoritas dan dipengaruhi oleh tradisi Anglo-Saxon dan Inggris juga berkontribusi besar terhadap perkembangan institusi Islam.

Eksistensi lembaga keuangan syariah akhir-akhir ini bukanlah hal yang asing lagi, seperti pernyataan GIFR (2012) bahwa pengoperasian perbankan syariah di samping perbankan konvensional sudah diterapkan sejak awal tahun 1980-an di Republik Islam Iran, Pakistan, dan Sudan, bahkan menurut Errico dan Farahbaksh (1998) membuat sebuah stigma bahwa perbankan syariah semakin meluas hingga lintas negara-negara barat, seperti negara Inggris.

Di negara Islam, munculnya lembaga keuangan syariah tentu berjalan tanpa hambatan, meskipun penerapannya belum 100 persen berlandaskan syariah, karena ada sisi dimana negara Islam masih berkiblat kepada barat, seperti sistem pencatatan yang masih menggunakan IFRS. Di Indonesia, lembaga keuangan syariah ini berjalan melalui beberapa hambatan, meskipun di Indonesia di dominasi oleh penduduk Muslim, karena sistem pemerintahan bukan sepenuhnya mengadopsi sistem Islam. Selain itu, Indonesia masih belum bisa terlepas dari intervensi asing, seperti faktor bantuan dana dari Bank Dunia sehingga harus patuh kepada syarat – syarat keuangan konvensional, dan juga faktor lainnya. Walaupun harus patuh terhadap kebijakan keuangan konvensional namun Indonesia sudah banyak menunjukkan keberpihakan kepada sistem keuangan syariah dari waktu ke waktu.

Sementara di Inggris adanya penerapan sistem Islam dalam sebuah institusi karena adanya kepentingan ekonomi yang kemudian di undang-undangkan. Islam lebih kepada sistem bukan jalan hidup. Dan dengan kondisi seperti ini, Inggris sangat mudah mencampurkan sistem

Islam dan mengganti dengan sistem lainnya jika terjadi fenomena-fenomena diluar kendali.

5. Simpulan dan Arah Penelitian Selanjutnya

Melihat hasil pembahasan, serta merujuk kepada literatur review bahwa perkembangan akuntansi di negara barat (Inggris), Asia (Indonesia), dan Arab (Arab Saudi) memiliki sejarah dan latar belakang politik serta budaya yang berbeda.

Pengaruh penerapan Islam terhadap beberapa institusi di negara tersebut, bahwa Inggris mengadopsi karena berdasarkan kebutuhan sebuah lembaga atau perusahaan yang terdapat di negara tersebut, sedangkan di Indonesia perkembangan akuntansi di negara tersebut berdasarkan kebijakan pemerintah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi eksternal meskipun di negara tersebut mayoritas Muslim. Sedangkan di negara Arab Saudi, lebih mudah penerapan Islam karena landasan negara tersebut berdasarkan landasan Islam, namun meskipun demikian, masih susah bagi negara ini untuk mengadopsi sistem akuntansi syariah secara *kaaffah*, karena banyaknya intervensi asing ke negara tersebut.

Di negara-negara tersebut, perkembangan sistem akuntansi didominasi oleh faktor politik dan ekonomi dibandingkan dengan faktor tradisi ataupun sosial. Seperti transformasi sistem akuntansi menuju IFRS di karenakan faktor politik dan ekonomi yang kuat dari pihak asing yang telah menjajah di negara-negara tersebut. Diantara ketiga negara tersebut, hanya Indonesia yang menunjukkan perkembangan akuntansi berbasis nilai syariah dengan mengedepankan penggunaan PSAK Syariah untuk lembaga keuangan syariah, bukan PSAK konvensional atau IFRS.

Apabila kita ingin kembali kejalan yang lurus dan benar, serta menjalankan sistem seperti yang di ajarkan oleh agama Islam, maka yang paling pertama yang harus dilakukan adalah mereformasi diri sendiri melalui edukasi berkala. Dengan mereformasi diri maka kita akan mampu mereformasi masyarakat dan pada gilirannya kita akan mereformasi bangsa.

Kemudian memberikan filter kepada sistem barat yang masuk ke tanah air dengan filter Islam, tentu ini akan berjalan melalui pemimpin negara yang amanah. Karena pada akhirnya sistem pemerintahan yang harus di reformasi menuju ke arah cahaya Islam.

Apabila kita mempercayai bahwa sistem akuntansi dan perekonomian di Indonesia harus mandiri dan bebas dari jebakan sosialis dan kebudayaan barat, maka yang paling rasional dan mungkin adalah melakukan perubahan dari

kita sendiri untuk mempraktikkan sistem syariah secara *kaaffah*.

Penelitian yang mengadopsi pendekatan kualitatif ini tidak lepas dari keterbatasan, maka dari itu kami mengusulkan ada perbaikan di masa yang akan datang. Data sekunder ini dapat diperkuat dengan mendapatkan data primer yaitu melalui interview dengan para pembuat standar akuntansi di negara – negara tersebut. Teori tentang sejarah dan seruan Al-Quran, ajaran Rasulullah SAW serta pendapat ulama tentang pentingnya peranan pencatatan keuangan perlu ditambahkan.

Daftar Pustaka

- Al-Quran
AAOIFI. (2010/1431H), Haiatul Muhasabah wal muraja'ah lil muassasati almaliyah al islamiyah, Bahrain.
Al-Qardawy. Y. 1998, "Fiqhuz-Zakah", (Penerbit: Beirut, Muassasah ar-Risalah)
Ali, K. 2007, "A Study of Islamic History" (Penerbit: Adam Publisher)
Antonio, M.S, Mukhlisin, M. 2013, "Analysis on Determinants in Implementation of Accounting Standards for Islamic Financial Institutions; Narrative Study between United Kingdom and Indonesia", Proceeding of Seventh Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting (APIRA) Conference, Kobe 26-28 July, 2013
Antonio. M.S, 2013, "Akuntansi Syariah: Teori & Praktek untuk Perbankan Syariah", (Jakarta: UPP STIM YKPN).
Graham, C. dan Neu, D. 2003, "Accounting for Globalization", Accounting Forum Vol 27 No 4
Chatfield, M. 1953, "Contemporary Studies in the evolution of Accounting Thought", (California: Dickenson Publishing Company).
Cooke, T. E. dan Wallace, R. 1990, "Financial disclosure regulation and its environment: A review and further analysis", Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 9 No. 2
Day, R. G. 2000, "UK Accounting Regulation: An Historical Perspective", in School of Finance & Law Working Paper Series, Bournemouth University
Diaconu, D. 2007, "Impact of Globalization On International Accounting Harmonization"
Errico, L. dan Farahbaksh, M. 1998, Islamic Banking-Issues in Prudential Regulations and Supervision, International Monetary Fund.
Gamayuni. R.R. 2009, "Perkembangan standar akuntansi keuangan Indonesia menuju

- IFRS", Jurnal Akuntansi Keuangan, Volume 14 Nomor 2
- GIFR, 2012, "Global Islamic Finance Report", BMB Islamic UK Limited.
- IAI, 2017 "Sejarah IAI", available at: http://iaiglobal.or.id/v03/tentang_iai/sejarah-iai (Di akses 15 April 2017)
- IFRS foundation, 2016, "Saudi Arabia to publish IFRS Standards for adoption purposes", available at : <http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/Saudi-Arabia-to-publish-ifrs-Standards-for-adoption-purposes.aspx> (Di akses 20 April 2017)
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1994, Qualitative data analysis: An Expanded Sourcebook
- Mukhlisin, M., Hudaib, M., Azid, T. 2015, "The need for Shariah harmonization in financial reporting standardization", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 8 No. 4, 2015, pp. 455-471
- Putri. A, 2010, "Perkembangan Akuntansi di Indonesia" JRAK, Vol. 2
- Yaya, R. 2009, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat).
- Rustiana, S.H. 2016, "The Development Of Syariah Accounting In indonesia", International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 9, Issue 5 (April)
- Soemarsono. SR. 1995, "Akuntansi Suatu Pengantar", (Jakarta: PT Rhineka Cipta.)
- SOCPA
- Nurhayati, S. dan Wasilah. 2011, "Akuntansi Syariah di Indonesia", (Jakarta: Salemba Empat)
- SOCPA, 2017, "Al Haiat Al Su'udiyah Lil muhasibiyin Al Qanuniyin" , available at : <http://www.socpa.org.sa/Socpa/About-Socpa/SOCPA-Projects.aspx> (akses 21 April 2017)
- Suardikha, I. 2012, "Kuasa Universitas dan Profesi Akuntan dalam Pengembangan Profesi Akuntansi ", Buletin Studi Ekonomi, Vol. 17 No. 2.
- Sukarsono, E. 1998, "Accounting in A Historical Transition", in 2nd Asia-Pacific Interdisciplinary Research on Accounting (APIRA), Osaka – Japan
- Dalton, B. 1995, Handbook of Indonesia, Moon Publication, USA
- Syakir, M. 2010, "Attarikhul Islami", (Penerbit : Almaktabah Al-Islami)
- Tarca, A. 2004, "International convergence of accounting practices: Choosing between IAS and US GAAP", Journal of International Financial Management & Accounting, Vol. 15 No. 1,
- Zaid. O.A. 2001, "Were Islamic Records Precursors To Accounting Books Based on The Italian Method?, A Response", Accounting Historians Journal Vol. 28, No. 2

